

IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR UNTUK MEMBENTUK CIVIC SKILLS

¹Liza Satria, ²Christin Angelita Sianturi, ³Nurizam Auji, ⁴Suhaila Siregar, ⁵Sri Yunita, ⁶

Reh Bungana Br Perangin-angin

¹⁻⁶Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Kata kunci:

nilai demokrasi; pembelajaran sekolah dasar; *civic skills*; pembelajaran demokratis; pendidikan kewarganegaraan

Corresponding author's email:
lizasatria250600@gmail.com

Abstrak

Implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk *civic skills* siswa sebagai bagian dari penguatan pendidikan kewarganegaraan sejak dini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar serta relevansinya terhadap pembentukan *civic skills* siswa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis isi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi melalui pembelajaran partisipatif, musyawarah, diskusi, kerja sama dan pembelajaran berbasis masalah berkontribusi terhadap berkembangnya keterampilan intelektual dan partisipatoris siswa seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, pengambilan keputusan dan tanggung jawab sosial. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi nilai demokrasi dipengaruhi oleh kompetensi guru, budaya sekolah yang demokratis serta strategi pembelajaran yang mendukung partisipasi aktif siswa, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Penelitian ini berimplikasi bahwa pembelajaran demokratis perlu diposisikan sebagai strategi pedagogis yang integratif dalam penguatan *civic skills* serta pembentukan warga negara yang aktif, kritis, partisipatif dan bertanggung jawab sejak pendidikan dasar.

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan memiliki keterampilan kewarganegaraan sejak dini. Sekolah dasar bukan hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai ruang pembentukan nilai, sikap dan perilaku sosial yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tersebut, implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran menjadi penting karena dapat berkontribusi terhadap pembentukan *civic skills* siswa seperti kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan persoalan sosial secara bertanggung jawab. Penguatan *civic skills* di sekolah dasar dipandang penting karena pada fase ini peserta didik sedang berada pada tahap perkembangan yang menentukan pembentukan karakter dan identitas kewarganegaraan mereka di masa mendatang (Febrianti et al. 2023).

Urgensi implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran semakin menguat di tengah berbagai tantangan kehidupan sosial saat ini. Rendahnya

budaya dialog, lemahnya sikap toleransi, meningkatnya perilaku individualistik serta minimnya partisipasi sosial di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil menanamkan praktik kehidupan demokratis secara optimal. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi peserta didik untuk mengalami dan mempraktikkan nilai demokrasi dalam kehidupan belajar sehari-hari. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, pembelajaran demokratis bukan hanya bertujuan mengenalkan konsep demokrasi secara teoritis, melainkan juga membangun pengalaman nyata siswa dalam menjalankan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, penghargaan terhadap perbedaan, musyawarah serta tanggung jawab sosial (Marshanda, Amri, dan Putra, 2025).

Implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, kerja sama dalam menyelesaikan tugas, musyawarah kelas, pembelajaran berbasis masalah, simulasi sosial, maupun pembiasaan budaya kelas yang partisipatif. Melalui aktivitas tersebut, siswa tidak hanya belajar mengenai demokrasi sebagai materi pelajaran, tetapi juga mengalami praktik demokrasi secara langsung dalam interaksi belajar. Pengalaman belajar semacam ini penting karena *civic skills* tidak tumbuh hanya melalui pemahaman konseptual, tetapi juga melalui pembiasaan dan pengalaman nyata dalam lingkungan pendidikan. Pembelajaran yang memberi ruang partisipasi aktif, dialog dan refleksi kritis terbukti berkontribusi terhadap berkembangnya kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab sosial dan keterampilan komunikasi peserta didik (Fadila and Dikarsa 2026; Maimuna et al. 2025; Musa 2025). Oleh sebab itu, implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran menjadi salah satu pendekatan strategis untuk membangun keterampilan kewarganegaraan sejak pendidikan dasar.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi memiliki hubungan erat dengan pembentukan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Lingkungan belajar yang demokratis dan partisipatif terbukti berpengaruh terhadap berkembangnya sikap toleran, kesadaran sosial serta kemampuan siswa dalam terlibat secara aktif dalam kehidupan bersama (Pratiyaksi, Sanjaya, and Suastika 2025). Selain itu, penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila juga berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam menyampaikan argumentasi, menghargai perbedaan pendapat dan mengambil keputusan secara kolektif (Anjelina and Putro 2026). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi bukan sekadar berkaitan dengan penanaman nilai, tetapi juga menjadi pendekatan pedagogis yang mampu mendukung pengembangan *civic skills* siswa secara lebih komprehensif.

Dalam konteks Indonesia, implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran memiliki landasan yang kuat, baik secara filosofis maupun kurikuler. Nilai-nilai demokrasi sejalan dengan Pancasila serta tujuan

pendidikan nasional yang menekankan pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, IPS, maupun penguatan budaya sekolah, nilai-nilai demokrasi sesungguhnya memiliki ruang yang luas untuk diinternalisasikan kepada peserta didik. Bahkan, kebijakan penguatan Profil Pelajar Pancasila juga menekankan pentingnya pengembangan gotong royong, bernalar kritis dan kebinekaan global yang beririsan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian, implementasi nilai demokrasi dalam praktik pembelajaran masih menghadapi berbagai tantangan. Pembelajaran di sekolah dasar pada banyak kasus masih cenderung berpusat pada guru, menekankan hafalan dan kurang memberi ruang bagi partisipasi aktif siswa. Kesenjangan antara idealitas pendidikan demokratis dan praktik pembelajaran ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius (Rusyadi et al., 2026).

Di sisi lain, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian tentang demokrasi dalam pendidikan dasar lebih banyak berfokus pada pendidikan karakter, budaya sekolah, model pembelajaran partisipatif atau implementasi nilai Pancasila. Sementara itu, kajian yang secara spesifik menghubungkan implementasi nilai demokrasi dengan pembentukan *civic skills* siswa sekolah dasar masih relatif terbatas. Padahal *civic skills* merupakan komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya mencakup keterampilan intelektual seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah tetapi juga keterampilan partisipatoris seperti berdiskusi, bekerja sama dan terlibat dalam kehidupan sosial (Purba et al. 2024). Keterampilan tersebut tidak dapat berkembang secara optimal tanpa adanya pembelajaran yang memberi ruang praktik demokratis secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran dapat berkontribusi terhadap pembentukan *civic skills* siswa sekolah dasar.

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap penelitian terdahulu, terlihat bahwa sebagian penelitian membahas demokrasi sebagai nilai pendidikan, sementara sebagian lainnya mengkaji *civic skills* sebagai hasil pembelajaran kewarganegaraan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu fokus kajian, terutama melalui pendekatan konseptual berbasis literatur. Padahal dalam konteks perkembangan abad ke-21, penguatan kompetensi kewargaan membutuhkan pembelajaran yang demokratis, reflektif dan partisipatif agar peserta didik memiliki kesiapan menghadapi dinamika kehidupan sosial, politik dan budaya yang semakin kompleks (Sholikhah 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk diisi melalui kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan implementasi nilai demokrasi dan pembentukan *civic skills* di sekolah dasar.

Posisi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis konseptual berbasis kajian literatur. Penelitian ini berupaya

menelaah bagaimana implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar dipahami, diintegrasikan, dan dihubungkan dengan penguatan *civic skills* siswa berdasarkan berbagai penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek implementasi pembelajaran atau karakter demokratis secara terpisah, penelitian ini menempatkan implementasi nilai demokrasi sebagai strategi pendidikan yang secara langsung berkontribusi terhadap pembentukan keterampilan kewargaan peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus teoretis pada bidang pendidikan dasar, khususnya pendidikan kewarganegaraan.

Penelitian ini juga memiliki relevansi praktis karena perkembangan masyarakat demokratis saat ini menuntut warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, berdialog, berkolaborasi dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Kompetensi tersebut perlu dibangun sejak pendidikan dasar melalui pembelajaran yang tidak sekadar mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga memberi pengalaman hidup berdemokrasi. Sekolah dasar sebagai fondasi pendidikan memiliki peran sentral dalam menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang aktif, kritis dan berkarakter. Oleh sebab itu, implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran perlu dipahami secara lebih mendalam agar dapat menjadi bagian dari penguatan kualitas pendidikan dasar.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah penelitian ini berangkat dari pentingnya implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar sebagai sarana pembentukan *civic skills* siswa, di tengah masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas keterkaitan keduanya secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar serta relevansinya dalam penguatan *civic skills* siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian pendidikan dasar serta menjadi rujukan praktis bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih demokratis, partisipatif dan berorientasi pada pembentukan keterampilan kewargaan peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan, pengkajian dan analisis berbagai sumber literatur untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar dalam membentuk *civic skills* siswa. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah teori, konsep, hasil penelitian terdahulu serta berbagai dokumen ilmiah yang relevan sehingga memungkinkan peneliti membangun sintesis pemikiran secara sistematis, kritis dan komprehensif (Maulidya et al. 2026). Pendekatan ini dinilai tepat karena

topik penelitian menekankan analisis konseptual terhadap berbagai gagasan dan temuan penelitian yang telah berkembang, bukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional yang membahas nilai demokrasi, pembelajaran demokratis, pendidikan kewarganegaraan dan *civic skills* pada pendidikan dasar, khususnya artikel yang diterbitkan dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Pemilihan rentang waktu tersebut dilakukan agar data yang digunakan relevan dengan perkembangan isu pendidikan kontemporer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku referensi, prosiding, dokumen kebijakan pendidikan serta sumber lain yang mendukung fokus kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian dilakukan seleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, kebaruan referensi, dan keterkaitan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi literatur, klasifikasi data berdasarkan tema utama, reduksi data, interpretasi isi dan sintesis konsep dari berbagai sumber yang telah dikaji. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan pola, hubungan antarkonsep, kecenderungan hasil penelitian terdahulu serta relevansi implementasi nilai demokrasi terhadap pembentukan *civic skills* siswa sekolah dasar. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara sistematis untuk membangun pemahaman yang utuh dan komprehensif sesuai fokus penelitian.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari beragam sumber ilmiah yang relevan. Teknik ini dilakukan agar data yang digunakan memiliki konsistensi, kedalaman analisis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan kajian konseptual yang sistematis, mendalam serta memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan pembelajaran demokratis dalam pendidikan dasar.

HASIL KAJIAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis berbagai literatur yang membahas implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar serta relevansinya terhadap pembentukan *civic skills* siswa. Berdasarkan hasil penelusuran dan sintesis dari berbagai sumber, ditemukan bahwa implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai penanaman nilai, tetapi juga berkontribusi dalam membangun keterampilan kewargaan peserta didik melalui praktik pembelajaran yang partisipatif, dialogis dan kolaboratif. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai demokrasi

seperti musyawarah, toleransi, partisipasi, tanggung jawab dan penghargaan terhadap perbedaan dapat diinternalisasikan melalui proses pembelajaran di kelas maupun budaya sekolah. Implementasi nilai-nilai tersebut berimplikasi pada berkembangnya *civic skills* siswa, baik dalam aspek keterampilan intelektual maupun keterampilan partisipatoris.

Secara umum, hasil kajian ini menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar dilakukan melalui pembelajaran partisipatif, pembiasaan musyawarah, kerja kelompok, diskusi serta pembelajaran berbasis masalah sosial. Kedua, implementasi tersebut berkontribusi terhadap pembentukan *civic skills* siswa seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama, pengambilan keputusan dan tanggung jawab sosial. Ketiga, keberhasilan implementasi nilai demokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti kompetensi guru, budaya sekolah dan strategi pembelajaran yang digunakan, namun juga menghadapi sejumlah tantangan dalam praktiknya. Untuk memperjelas temuan penelitian, hasil kajian disajikan ke dalam beberapa subtemuan berikut.

1. Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Sekolah Dasar

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar dilakukan melalui integrasi nilai-nilai demokrasi dalam aktivitas belajar sehari-hari. Nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, toleransi, musyawarah, tanggung jawab dan keadilan diimplementasikan bukan hanya sebagai materi pembelajaran, tetapi juga melalui praktik pembelajaran yang memberi ruang keterlibatan aktif siswa. Implementasi tersebut tampak dalam diskusi kelompok, kerja kolaboratif, pengambilan keputusan bersama, hingga penyelesaian konflik melalui musyawarah kelas.

Pembelajaran partisipatif menjadi salah satu bentuk implementasi yang dominan ditemukan dalam berbagai kajian. Melalui pembelajaran partisipatif, siswa diberi kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, menanggapi gagasan teman dan terlibat dalam pemecahan masalah. Praktik ini tidak hanya menanamkan nilai demokrasi, tetapi juga membangun budaya belajar yang menghargai dialog dan keberagaman pandangan. Selain itu, pembelajaran berbasis masalah sosial juga menjadi sarana implementasi nilai demokrasi karena mendorong siswa untuk memahami persoalan bersama dan mencari solusi secara kolektif.

Secara sintesis, implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran dan keterkaitannya dengan *civic skills* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sintesis Implementasi Nilai Demokrasi dan Pembentukan *Civic Skills* Siswa Sekolah Dasar

Nilai Demokrasi	Bentuk Implementasi dalam Pembelajaran	Civic Skills yang Berkembang
Musyawarah	Diskusi kelas, pengambilan	Berargumentasi,

	keputusan bersama	pengambilan keputusan
Toleransi	Menghargai perbedaan pendapat	Empati, komunikasi sosial
Partisipasi	Keterlibatan aktif dalam pembelajaran	Partisipasi sosial, tanggung jawab
Kerja sama	Pembelajaran kolaboratif	Kolaborasi, pemecahan masalah
Tanggung jawab	Pembagian peran dan tugas	Disiplin, tanggung jawab kewargaan

Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan *civic skills* siswa. Setiap nilai demokrasi yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran berkontribusi terhadap berkembangnya keterampilan kewargaan tertentu, baik dalam aspek intelektual maupun partisipatoris. Nilai musyawarah, misalnya, tidak hanya diwujudkan melalui diskusi kelas dan pengambilan keputusan bersama, tetapi juga berperan dalam melatih kemampuan berargumentasi serta pengambilan keputusan secara rasional dan bertanggung jawab.

Nilai toleransi yang diimplementasikan melalui penghargaan terhadap perbedaan pendapat turut mendukung berkembangnya empati dan kemampuan komunikasi sosial siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran demokratis berfungsi sebagai sarana pembentukan sikap sosial yang mendukung kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk. Sementara itu, nilai partisipasi dan kerja sama memperlihatkan kontribusi yang kuat terhadap tumbuhnya keterampilan kolaborasi, keterlibatan sosial dan pemecahan masalah, yang merupakan bagian penting dari *civic skills*.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa tanggung jawab sebagai salah satu nilai demokrasi memiliki hubungan dengan berkembangnya disiplin dan tanggung jawab kewargaan siswa. Artinya, implementasi nilai demokrasi tidak hanya berorientasi pada pembentukan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga pada penguatan keterampilan sosial dan partisipatif yang dibutuhkan dalam kehidupan demokratis. Secara keseluruhan, interpretasi tabel menegaskan bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan nilai demokrasi berkontribusi langsung terhadap penguatan *civic skills* siswa sekolah dasar, sehingga pembelajaran demokratis dapat diposisikan sebagai strategi penting dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis dan bertanggung jawab.

2. Pembentukan Civic Skills melalui Pembelajaran Demokratis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan *civic skills* siswa sekolah dasar. Berdasarkan hasil sintesis berbagai kajian, *civic skills* yang berkembang melalui pembelajaran demokratis mencakup dua dimensi

utama, yaitu keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan partisipatoris (*participatory skills*). Kedua dimensi ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam membentuk kompetensi kewargaan peserta didik sejak dini.

Pada dimensi keterampilan intelektual, pembelajaran demokratis berkontribusi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengemukakan alasan secara logis, menganalisis persoalan sederhana serta mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Keterampilan ini tumbuh melalui pengalaman belajar yang memberi ruang dialog, diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah dan refleksi terhadap persoalan sosial yang dekat dengan kehidupan siswa. Dalam pembelajaran yang demokratis, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi didorong untuk berpikir, menilai dan merespons suatu persoalan berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Melalui kegiatan diskusi kelompok, misalnya, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain serta mempertimbangkan berbagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan bersama. Aktivitas ini secara tidak langsung melatih kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang menjadi bagian dari *civic skills*. Selain itu, pembelajaran berbasis masalah juga memberi peluang bagi siswa untuk menganalisis persoalan sosial sederhana seperti aturan kelas, tanggung jawab bersama atau pentingnya kerja sama dalam kehidupan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran demokratis berperan dalam membangun keterampilan intelektual siswa sebagai bekal awal menjadi warga negara yang reflektif dan kritis.

Sementara itu, pada dimensi keterampilan partisipatoris, pembelajaran demokratis mendorong berkembangnya kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, bernegosiasi, menghargai pendapat orang lain dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial di lingkungan sekolah. Keterampilan ini terbentuk melalui pengalaman langsung siswa dalam aktivitas kolektif yang menuntut interaksi, tanggung jawab bersama serta keterlibatan aktif dalam proses belajar. Dalam pembelajaran yang demokratis, siswa dibiasakan untuk tidak hanya menjadi penerima pembelajaran, tetapi juga menjadi subjek yang terlibat aktif dalam berbagai proses sosial di kelas.

Praktik musyawarah kelas, kerja kelompok, pembagian peran dalam tugas bersama, maupun keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah menjadi bentuk nyata pembelajaran demokratis yang mendorong berkembangnya *participatory skills*. Melalui pengalaman tersebut, siswa belajar menghargai perbedaan, membangun kesepakatan, menyelesaikan konflik secara damai dan bertanggung jawab terhadap keputusan bersama. Keterampilan ini penting karena menjadi dasar bagi tumbuhnya kesadaran partisipatif dan tanggung jawab kewargaan pada jenjang pendidikan berikutnya.

Berdasarkan hasil kajian, pembentukan *civic skills* tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan yang berlangsung secara

berkelanjutan dalam pembelajaran. Semakin konsisten nilai demokrasi diterapkan melalui interaksi belajar, strategi pembelajaran dan budaya kelas, semakin besar peluang berkembangnya keterampilan kewargaan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa *civic skills* tidak cukup dibentuk melalui pembelajaran konseptual tentang kewarganegaraan, tetapi memerlukan pengalaman demokratis yang nyata dalam kehidupan sekolah. Dengan kata lain, siswa belajar menjadi warga negara demokratis melalui praktik berdemokrasi yang mereka alami sehari-hari.

Untuk memperjelas hasil kajian mengenai dimensi *civic skills* yang berkembang melalui pembelajaran demokratis, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Dimensi *Civic Skills* yang Berkembang melalui Pembelajaran Demokratis

Dimensi Civic Skills	Indikator Keterampilan	Bentuk Pembelajaran Demokratis
Keterampilan Intelektual	Berpikir kritis, berargumentasi, pengambilan keputusan	Diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah
Keterampilan Intelektual	Analisis persoalan sosial sederhana	Pembelajaran berbasis masalah
Keterampilan Partisipatoris	Kerja sama, komunikasi, negosiasi	Kerja kelompok, musyawarah kelas
Keterampilan Partisipatoris	Partisipasi sosial dan tanggung jawab	Aktivitas kolektif dan budaya kelas demokratis

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran demokratis memberikan kontribusi terhadap perkembangan berbagai indikator *civic skills* melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan partisipatif. Keterampilan intelektual berkembang melalui aktivitas yang mendorong penalaran dan refleksi, sedangkan keterampilan partisipatoris berkembang melalui pengalaman kolaborasi dan keterlibatan sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran demokratis tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan pedagogis, tetapi juga sebagai strategi pembentukan warga negara yang aktif, kritis, partisipatif dan bertanggung jawab sejak pendidikan dasar. Dengan demikian, implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran memiliki posisi yang sangat strategis dalam penguatan *civic skills* siswa sebagai bagian dari tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar.

3. Faktor Pendukung dan Tantangan Implementasi Nilai Demokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan, baik yang berasal dari aspek guru, lingkungan

sekolah, maupun sistem pembelajaran yang digunakan. Faktor-faktor tersebut menjadi elemen penting dalam menentukan sejauh mana nilai demokrasi dapat diinternalisasikan secara efektif dalam proses pembelajaran dan berdampak pada pembentukan *civic skills* siswa. Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat tiga faktor utama yang paling dominan mendukung implementasi nilai demokrasi, yaitu kompetensi guru, budaya sekolah yang demokratis, dukungan kurikulum serta strategi pembelajaran.

Faktor pertama yang menjadi penentu utama adalah kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang partisipatif dan demokratis. Guru memiliki peran sentral sebagai fasilitator yang tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga menciptakan suasana belajar yang terbuka, dialogis dan inklusif. Guru yang memiliki pemahaman kuat tentang pembelajaran demokratis cenderung lebih mampu memberi ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan pendapat, bertanya, berdiskusi dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama di kelas. Kompetensi pedagogis guru juga berpengaruh terhadap kemampuan mengintegrasikan nilai demokrasi melalui model pembelajaran kolaboratif, diskusi, pemecahan masalah, maupun pembelajaran berbasis proyek sosial.

Selain kompetensi pedagogis, sikap guru terhadap demokrasi juga menjadi faktor pendukung penting. Guru yang menghargai keberagaman pendapat, memberi kesempatan yang setara kepada siswa, dan membangun komunikasi dua arah dalam pembelajaran akan lebih mudah menumbuhkan budaya kelas yang demokratis. Dalam konteks ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan praktik demokrasi bagi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi nilai demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas peran guru dalam mengelola pembelajaran.

Faktor kedua adalah budaya sekolah yang mendukung praktik demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah yang membangun budaya musyawarah, penghargaan terhadap keberagaman, keterbukaan dan partisipasi siswa cenderung lebih berhasil dalam menginternalisasikan nilai demokrasi. Budaya sekolah yang demokratis memberikan ruang bagi siswa untuk belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman sosial dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Praktik seperti musyawarah kelas, pemilihan ketua kelas, penyusunan aturan bersama serta keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah merupakan bentuk nyata budaya demokratis yang mendukung pembentukan *civic skills* secara berkelanjutan.

Faktor ketiga adalah dukungan kurikulum dan strategi pembelajaran inovatif. Kurikulum yang memberi ruang bagi pembelajaran partisipatif, pendidikan karakter dan penguatan nilai kewarganegaraan menjadi faktor yang memperkuat implementasi nilai demokrasi di sekolah dasar. Selain itu, penggunaan strategi pembelajaran inovatif seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah dan diskusi reflektif terbukti mampu menciptakan pengalaman belajar yang mendukung praktik demokratis. Dengan

demikian, keberhasilan implementasi nilai demokrasi tidak hanya bergantung pada individu guru, tetapi juga ditopang oleh sistem pembelajaran yang mendukung.

Untuk memperjelas faktor-faktor pendukung implementasi nilai demokrasi, hasil sintesis kajian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Faktor Pendukung Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran

Faktor Pendukung	Bentuk Dukungan	Kontribusi terhadap Civic Skills
Kompetensi Guru	Pembelajaran partisipatif dan dialogis	Mengembangkan berpikir kritis dan partisipasi
Budaya Sekolah Demokratis	Musyawarah, penghargaan keberagaman	Menguatkan tanggung jawab dan keterlibatan sosial
Dukungan Kurikulum	Integrasi nilai demokrasi dalam pembelajaran	Mendorong penguatan keterampilan kewargaan
Strategi Pembelajaran Inovatif	Diskusi, kolaborasi, problem solving	Mengembangkan komunikasi dan pemecahan masalah

Selain faktor pendukung, hasil penelitian juga menunjukkan adanya sejumlah tantangan dalam implementasi nilai demokrasi di sekolah dasar. Salah satu tantangan utama adalah praktik pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher-centered). Dalam pembelajaran yang didominasi guru, siswa cenderung menjadi penerima informasi secara pasif dan memiliki ruang terbatas untuk berpartisipasi aktif. Kondisi ini menjadi hambatan bagi berkembangnya pengalaman belajar demokratis yang seharusnya memberi ruang dialog dan keterlibatan siswa.

Tantangan lain yang ditemukan adalah dominasi pendekatan hafalan dan orientasi pembelajaran yang masih berfokus pada capaian kognitif. Model pembelajaran seperti ini cenderung menempatkan pendidikan demokrasi sebatas pengetahuan, belum sampai pada pembentukan pengalaman dan keterampilan demokratis siswa. Padahal *civic skills* memerlukan pengalaman nyata melalui interaksi dan praktik sosial, bukan hanya pemahaman konseptual.

Selain itu, terbatasnya ruang partisipasi siswa dalam pembelajaran maupun kegiatan sekolah juga menjadi tantangan yang cukup dominan. Dalam beberapa praktik pendidikan, siswa masih belum diberi kesempatan yang memadai untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, menyampaikan gagasan atau menyelesaikan persoalan bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi belum sepenuhnya menjadi budaya pembelajaran.

Tantangan lainnya adalah pemahaman guru yang masih menempatkan demokrasi sebatas materi ajar, bukan sebagai praktik pedagogis. Dalam kondisi

ini, demokrasi diajarkan sebagai konsep, tetapi belum diwujudkan dalam interaksi belajar. Padahal pembelajaran demokratis menuntut adanya konsistensi antara nilai yang diajarkan dan praktik yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. Untuk memperjelas berbagai tantangan tersebut, hasil kajian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Tantangan Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran

Tantangan	Bentuk Permasalahan	Dampak terhadap Pembelajaran Demokratis
Pembelajaran berpusat pada guru	Dominasi guru dalam proses belajar	Rendahnya partisipasi siswa
Pendekatan hafalan	Fokus pada aspek kognitif	Civic skills kurang berkembang
Minim ruang partisipasi	Siswa kurang terlibat aktif	Praktik demokrasi tidak terbentuk
Pemahaman guru terbatas	Demokrasi hanya sebagai materi ajar	Implementasi nilai kurang optimal

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan *civic skills* siswa, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kompetensi guru, budaya sekolah dan strategi pembelajaran yang kondusif. Di sisi lain, berbagai tantangan yang ditemukan menunjukkan perlunya penguatan praktik pembelajaran yang lebih partisipatif dan demokratis. Dengan demikian, implementasi nilai demokrasi tidak hanya memerlukan integrasi nilai dalam kurikulum, tetapi juga transformasi praktik pembelajaran agar benar-benar mampu menjadi sarana pembentukan warga negara yang aktif, kritis dan bertanggung jawab sejak pendidikan dasar.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan *civic skills* siswa. Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran demokratis tidak hanya berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai, tetapi juga sebagai strategi pedagogis yang berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi kewargaan peserta didik. Implementasi nilai demokrasi melalui pembelajaran partisipatif, musyawarah, kerja sama dan dialog terbukti berkorelasi dengan berkembangnya keterampilan intelektual dan partisipatoris siswa. Hasil tersebut memperkuat hipotesis kerja penelitian bahwa semakin optimal implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran, semakin kuat pula penguatan *civic skills* siswa sekolah dasar.

Pendidikan demokrasi pada jenjang sekolah dasar tidak cukup diposisikan sebagai penyampaian pengetahuan mengenai demokrasi, melainkan

perlu diwujudkan melalui pengalaman belajar yang memungkinkan siswa mempraktikkan nilai-nilai demokratis secara langsung. Keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan, dialog dan praktik partisipatif merupakan fondasi penting pembentukan kompetensi kewargaan. Dalam perspektif ini, pembelajaran demokratis menjadi ruang praksis bagi siswa untuk belajar menjadi warga negara sejak dini, bukan hanya memahami konsep kewargaan secara teoritis (Arifin 2021).

Pada dimensi keterampilan intelektual, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi berkontribusi terhadap berkembangnya kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah serta pengambilan keputusan yang rasional. Keterampilan tersebut tumbuh melalui pengalaman belajar yang memberi ruang bagi siswa untuk berdialog, berefleksi serta terlibat dalam analisis persoalan bersama. Dengan demikian, pembelajaran demokratis berfungsi bukan hanya sebagai pendekatan instruksional tetapi sebagai medium yang memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan intelektual yang menjadi bagian esensial dari *civic skills* (Afifah and Mukhli 2024).

Pada dimensi keterampilan partisipatoris, praktik musyawarah, kolaborasi dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran berkontribusi terhadap terbentuknya kesadaran partisipatif dan tanggung jawab sosial. Keterampilan seperti bekerja sama, bernegosiasi, menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam aktivitas kolektif tumbuh melalui pengalaman interaksi sosial yang difasilitasi dalam pembelajaran demokratis. Dalam kerangka ini, *civic skills* dipahami bukan hanya sebagai kompetensi individual tetapi juga sebagai kapasitas sosial yang berkembang melalui relasi demokratis di lingkungan pendidikan (Apriliani, Putri, and Unzzila 2024).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi nilai demokrasi dipengaruhi oleh kompetensi guru, budaya sekolah dan strategi pembelajaran yang digunakan. Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran demokratis menjadi sangat penting karena kualitas pengalaman belajar siswa sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru membangun interaksi yang terbuka, dialogis dan inklusif. Pendidikan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh konten yang diajarkan tetapi juga oleh praktik pedagogis yang memungkinkan siswa mengalami demokrasi secara nyata (Gea et al. 2026). Dalam perspektif tersebut, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai agen pembentuk kultur demokratis dalam pembelajaran.

Di sisi lain, hasil penelitian terkait berbagai tantangan implementasi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas pembelajaran demokratis dan praktik pendidikan di sekolah dasar. Dominasi pembelajaran berpusat pada guru, pendekatan hafalan, serta terbatasnya ruang partisipasi siswa menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi belum sepenuhnya diimplementasikan sebagai pengalaman belajar yang autentik. Tantangan ini memperlihatkan perlunya transformasi pedagogi dari model transmisi

pengetahuan menuju pembelajaran yang berbasis partisipasi dan pengalaman kewargaan (Arif et al., 2024).

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan *civic skills* di sekolah dasar tidak dapat dilepaskan dari pembangunan pembelajaran yang demokratis secara konsisten. Pembelajaran demokratis perlu diposisikan sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, bukan sekadar strategi pembelajaran alternatif. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi nilai demokrasi berkontribusi terhadap pembentukan budaya demokratis sejak dini yang mendukung lahirnya warga negara yang kritis, partisipatif dan bertanggung jawab. Selain itu, pengembangan *civic skills* juga relevan dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21, khususnya dalam aspek kolaborasi, komunikasi dan partisipasi sosial sebagai bagian dari kewargaan kontemporer (Muhammad et al. 2025).

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat bahwa implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran dapat diposisikan sebagai strategi penguatan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa guru perlu merancang pembelajaran yang lebih dialogis, reflektif dan memberi ruang partisipasi siswa secara nyata. Sekolah juga perlu membangun budaya demokratis sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran yang mendukung tumbuhnya *civic skills* secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembelajaran demokratis tidak hanya berorientasi pada pembentukan siswa yang memahami demokrasi, tetapi juga pada pembentukan siswa yang memiliki kemampuan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sosial.

Secara konseptual, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi adanya keterkaitan antara implementasi nilai demokrasi dan pembentukan *civic skills* siswa sekolah dasar, tetapi juga menawarkan kontribusi teoretis berupa kerangka konseptual integratif yang menempatkan nilai demokrasi, praktik pembelajaran demokratis dan *civic skills* sebagai hubungan yang saling berkaitan secara sistematis. Dalam kerangka tersebut, nilai demokrasi diposisikan bukan sekadar muatan normatif dalam pembelajaran, tetapi sebagai landasan pedagogis yang bekerja melalui pengalaman belajar partisipatif untuk menghasilkan penguatan keterampilan kewargaan siswa. Perspektif ini memperluas kajian sebelumnya yang cenderung membahas pendidikan demokrasi dan *civic skills* secara terpisah, dengan menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan pedagogis yang bersifat konstruktif dan saling menguatkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyintesis berbagai temuan literatur ke dalam bangunan konseptual yang menegaskan implementasi nilai demokrasi sebagai strategi pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak berhenti pada penguatan argumentasi mengenai pentingnya pembelajaran demokratis, tetapi juga pada pengembangan perspektif konseptual yang dapat menjadi

rujukan bagi kajian maupun praktik pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar.

Selain memberikan implikasi teoretis dan praktis, penelitian ini juga membuka arah penelitian di masa depan. Kajian lanjutan dapat diarahkan pada penelitian empiris mengenai implementasi nilai demokrasi dalam praktik pembelajaran sekolah dasar melalui studi lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai model implementasi yang efektif dalam membentuk *civic skills*. Di samping itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian mengenai integrasi nilai demokrasi dengan pendidikan kewarganegaraan digital, penguatan Profil Pelajar Pancasila, maupun pembelajaran abad ke-21 yang semakin relevan dengan perkembangan pendidikan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual, tetapi juga membuka ruang pengembangan penelitian lanjutan dalam kajian pendidikan demokrasi di sekolah dasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran sekolah dasar memiliki peran strategis dalam membentuk *civic skills* siswa melalui pengembangan keterampilan intelektual dan partisipatoris yang diwujudkan dalam praktik pembelajaran partisipatif, dialogis, kolaboratif dan demokratis. Nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, toleransi, partisipasi, tanggung jawab dan kerja sama terbukti tidak hanya berfungsi sebagai internalisasi nilai, tetapi juga sebagai landasan pedagogis dalam membangun kompetensi kewarganegaraan peserta didik sejak dini. Keberhasilan implementasi tersebut dipengaruhi oleh kompetensi guru, budaya sekolah yang demokratis serta strategi pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif siswa, meskipun masih dihadapkan pada tantangan dalam praktik pendidikan. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai demokrasi dan pembentukan *civic skills* merupakan hubungan yang saling berkaitan secara integratif dalam penguatan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, sekaligus menunjukkan bahwa pembelajaran demokratis berkontribusi dalam menyiapkan warga negara yang kritis, partisipatif dan bertanggung jawab sesuai tuntutan kehidupan demokratis abad ke-21. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pentingnya pembelajaran demokratis sebagai strategi pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga membuka prospek pengembangan penelitian lanjutan mengenai model implementasi yang lebih kontekstual dan efektif dalam penguatan *civic skills* siswa sekolah dasar.

REFERENSI

Afifah, Kiki Rizkiatul, and Nurul Awaliyah Mukhli. 2024. "Strategi Yang Relevan Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Sekolah Dasar." *Ganesha Civic Education Journal* 6(2):161–68.

-
- Anjelina, Jelsy, and Khamim Zarkasih Putro. 2026. "PPKN SEBAGAI PONDASI DEMOKRASI: PENGUATAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN." *JEMARI: Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah* 8(1).
- Apriliani, Meli, Sheila Aulia Putri, and Untszaa Unzzila. 2024. "Peningkatan Partisipasi Aktif Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Pembelajaran Kolaboratif Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (3):1–9.
- Arif, Sirojuddin, Anindito Aditomo, Irsyad Zamjani, Adi Cilik Pierewan, Lukman Solihin, and Kaisar Julizar. 2024. *Menguatkan Ekosistem Menumbuhkan Pembelajar*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Arifin. 2021. "Persepsi Siswa Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan." *Research and Development Journal Of Education* 7(1):544–52. doi: <http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v7i1.12582>.
- Fadila, Azmi Nur Izza, and Asep Anggi Dikarsa. 2026. "PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOLABORATIF DALAM PEMBELAJARAN PPKN KELAS XI DI SMK MA ' ARIF SUKAWENING." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 14(01):209–16.
- Febrianti, Nurul, Syurya Muhammad Nur, Silvia Ratna Juwita, and Universitas Esa Unggul. 2023. "Penguatan Civic Skills Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Partisipasi Mahasiswa Sebagai Warga Negara." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 11(1):14–21.
- Gea, Ratapan, Armstrong Harefa, Berkat Persada Lase, Hendrikus Otniel, and Nasozaro Harefa. 2026. "Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Nias , Indonesia." *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5(1). doi: <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5182>.
- Maimuna, Siti, Herry Porda, Nugroho Putro, and Heri Susanto. 2025. "Efforts of History Teachers in Developing Students' Collaboration Skills at State Senior High School 5 Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan IPS* 15(3):1128–38. doi: <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3464>.
- Marshanda, Nikita Aura, Mira Amelia Amri, and Adi Putra. 2025. "Implementation of Project-Based Learning (PjBL) in PPKn Learning to Foster Democratic Participation in Elementary School Students : Literature Review." 6(1):78–87.
- Maulidya, Ayu Wandira, Hanifah Fathin Ritonga, Dwi Ananda Nasution, Muhammad Imran, Siska Purba, and Lily Sardiani Daulay. 2026. "Pandangan Islam Terhadap Pendidikan Seni." *Jurnal Edukatif* 4(1):10–20.
- Muhammad, Ahmad, Mustain Nashoha, Ashfiyah Nur Atqiya, Agreiccia
-

-
- Amelia, Laili Latifah, Adhi Fajar Hermawan, and Ali Bachtiar Galih P. 2025. "Analisis Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Civic Engagement." 121–29.
- Musa, Habibi. 2025. "Pendekatan Pembelajaran Mendalam Sebagai Strategi Inovatif Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan, Kepelatihan, Olahraga, Dan Kesehatan* 1(1):28–42.
- Pratiyaksi, Ni Made Diantari, Dewa Bagus Sanjaya, and I. Nengah Suastika. 2025. "PKn Sebagai Pendidikan Demokrasi Di Sekolah Menengah Pertama Di Jembrana." *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan* 5(11). doi: 10.17977/um065.v5.i8.2025.8.
- Purba, Griyani Elisabeth, Nike Margaretha Br Sembiring, Rani Oktavia Purba, Tessa Lonika Simanullang, and Abdinur Batubara. 2024. "Penguatan Civic Skill: Sebagai Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Untuk Mencegah Fomo Yang Menjadi Tren Baru Dalam Bermedia Sosial." *Journal of Educational Research and Humanities* 2:1–8.
- Rusyadi, Dewi Citra, Mila Sari, Syofiani, and Rieke Alyusfitri. 2026. "PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR DAN SOLUSI STRATEGIS MELALUI INOVASI PEMBELAJARAN BERPUSAT PADA SISWA." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 12.
- Sholikhah, Ni'matu. 2022. "LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN PADA PEMBELAJARAN ABAD KE-21." *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1(4):721–27.